



### Pemkot Jogja dinilai inovatif dan terbuka

Oleh Anggrainy Prasetyanti  
HARIAN JOGJA

**JOGJA:** Kota Jogja di bawah kepemimpinan Walikota Herry Zudianto diakui membawa banyak perubahan positif. Banyak terobosan yang dilakukan untuk mengarah pelaksanaan *good government*. Salah satu indikasinya adalah dengan sistem perizinan yang lebih jelas dan terukur.

"Sistem perizinan di Jogja relatif lebih tertata dibandingkan kota-kota lain," kata dosen FISIPOL UGM, Arie Sujito kepada *Harian Jogja*, Minggu (1/5).

Arie mengatakan, di satu sisi sektor perizinan memang mengalami perkembangan, sayangnya masih ada sektor atau unit kerja dan SKPD (satu-an kerja perangkat daerah) lain yang masih tertinggal. Struktur pemerintahan yang ada di Kota Jogja belum semuanya bisa berlari sama kencangnya. Diakui Arie, di semua wilayah di Indonesia memang tidak ada yang sempurna, selalu ada faktor yang menghambat. Namun sejauh ini yang terjadi di Kota Jogja sudah jauh lebih baik.

Hal positif yang menjadi catatan Arie, di Pemkot Jogja saat ini adalah reformasi birokrasi yang sudah berjalan. "Salah satu indikasinya ya sistem perizinan yang semakin transparan tersebut," ujarnya.

Pemimpin yang inovatif dan punya terobosan besar juga harus didukung dengan mesin birokrasi yang bisa mengimbangi kinerja pemimpin daerahnya. Menurutnya, akan **percuana** jika pemimpinnya memiliki banyak inovasi namun jajaran staf di bawahnya tidak bisa menerjemahkan visi misi dan merealisasikannya.

Meskipun mengakui sudah banyak perkembangan, di pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan justru masih harus ada yang dibenahi. Sebagai kota yang berlabel kota pendidikan, seharusnya Jogja juga bisa mem-

benahi kompetensi pendidikan. Kaum miskin yang ada di kota ini bisa menjangkau pendidikan dan kesehatan yang layak dengan terjangkau dan tidak lagi terjadi komersialisasi pendidikan di kota ini.

Begitu juga dengan perwajahan kota. Dikatakan Arie, saat ini Jogja tidak ubahnya seperti kota reklame karena hampir di sepanjang jalan pasti dijumpai iklan mulai dari baliho, billboard hingga poster yang pemasangannya tidak lagi mengindahkan unsur estetika. Tidak lupa Arie menyoroti masalah kemacetan, banjir dan sanitasi. Sebagai kota wisata, ketiga masalah ini juga harus diurai dari pokok masalahnya sehingga bisa dilakukan pembenahan.

Pilkada yang sekarang ini berlangsung bagi Arie mestinya bisa dijadikan momen melihat calon pemimpin ke depan yang bisa membawa Kota Jogja menjadi lebih baik. Namun sayangnya hingga saat ini belum ada

an Kepada Yth. :  
 'alikota Yogyakarta  
 sekretaris Daerah  
 sisten .....

in Kepada Yth. :  
 Instansi  
**Din. Perizinan**  
 .....

**Positif**  
**Biasa**

debat atau pertarungan ide yang bisa dijadikan pembeda antara satu calon dengan calon yang lain. Yang berlangsung sampai saat ini masih berupa pencitraan cara lama dengan memasang poster dan baliho di mana-mana tanpa diketahui apa sebenarnya yang nanti akan mereka lakukan untuk Jogja.

Terpisah, Kepala Pusat Studi Kependidikan dan Kebijakan (PSKK) UGM, Muhadjir Darwin mengatakan penghargaan yang diterima Pemkot Jogja patut mendapat apresiasi. "Selama ini banyak pihak yang sejak lama menjadikan Pemkot Jogja sebagai *best practice*, sebagai contoh keberhasilan pemerintahan daerah di era desentralisasi yang penuh karut marut," ujarnya. Banyak daerah yang masih gagal menjalankan fungsi-fungsi dasar pemerintahan dan mewarisi kelemahan birokrasi masa lalu seperti korupsi dan pelayanan yang buruk pada masyarakat.

Meskipun Jogja mendapat skor rendah pada tingkat korupsi, bukan berarti birokrasi di Kota Jogja bebas korupsi. Demikian juga dengan pelayanan publik yang juga masih terjadi kekurangan.

Pemkot Jogja juga sangat terbuka dengan masukan dari pihak luar. PSKK UGM pernah juga membantu Pemkot mengembangkan pengukuran kemiskinan yang relevan dengan situasi spesifik masyarakat kota Jogja serta membantu Pemkot mengembangkan indeks kualitas pelayanan publik.

Mengenai lima hari kerja yang diberlakukan Pemkot Jogja, keduanya belum bisa berkomentar lebih banyak karena tidak memiliki cukup data untuk mengkritisi Pemkot. Mungkin Pemkot sendiri yang bisa melakukan evaluasi apakah sistem lima hari kerja memang benar lebih efisien dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005